



## **Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh, 1900-1942**

Madhan Anis<sup>1\*</sup>, Ramazan<sup>1</sup>, Okhaifi Prasetyo<sup>1</sup>, Reni Nuryanti<sup>1</sup>, Intan Safitri<sup>1</sup>, Wiwin Mauladi<sup>1</sup>, Maya Puspita<sup>1</sup>, Mutiara Rahayu<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Samudra; madhan.anis@unsam.ac.id\*

\*Korespondensi

Dikirim: 02-07-2023; Direvisi: 24-11-2023; Diterima: 07-12-2023; Diterbitkan: 30-12-2023

**Abstract:** The Dutch colonial presence in the eastern coastal region of Aceh had a significant influence on infrastructure development and cultural changes in the area. The buildings left over from the Dutch Colonial period on the East Coast of Aceh are physical evidence of the interaction between the Dutch and the people of Aceh at that time. Therefore, these relics must be protected and preserved. A lack of public understanding of the importance of preserving cultural heritage can result in neglect and lack of support for the preservation of these buildings. For this reason, the aim of this research is to identify buildings left over from the Dutch Colonial period in the cities on the East coast of Aceh, such as East Aceh, Langsa City, and Aceh Tamiang. The research used in this research is historical or historical research methods. The steps in historical research are heuristics, verification, interpretation, and historiography. As a result of the research that has been carried out, a number of locations of historical heritage building objects were found scattered at several points in East Aceh, Langsa City, and Aceh Tamiang. In East Aceh, the East Aceh Regent's Hall and the Water Storage Reservoir are historical heritage sites. Langsa City also has several historical heritage buildings, such as the Balee Juang Building, SD Negeri 1 Langsa, PDAM, Hall, Satpol PP and WH Building, and Langsa Post Office. Apart from that, in Aceh Tamiang, there is a Regent's pavilion building and a Dutch rubber plantation industrial building, which are important historical relics. These historical remains provide an overview of the cultural and historical heritage of the area.

**Keywords:** colonial building; east coast of Aceh; identification

**Abstrak:** Kehadiran Kolonial Belanda di wilayah pesisir Timur Aceh membawa pengaruh yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan perubahan budaya di daerah tersebut. Bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh menjadi bukti fisik dari interaksi antara Belanda dan masyarakat Aceh pada masa itu. Oleh karena itu, peninggalan tersebut harus dilindungi dan dilestarikan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan warisan budaya dapat mengakibatkan penelantaran dan kurangnya dukungan untuk pelestarian bangunan-bangunan tersebut. Untuk itu tujuan penelitian ini yakni mengidentifikasi bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di Kota pesisir Timur Aceh seperti di Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis. Langkah-langkah penelitian sejarah yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah lokasi objek bangunan peninggalan sejarah yang tersebar di beberapa titik di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Di Aceh Timur, terdapat Pendopo Bupati Aceh Timur dan Waduk Penampung Air sebagai peninggalan bersejarah. Kota Langsa juga memiliki beberapa bangunan peninggalan sejarah seperti Gedung Balee Juang, SD Negeri 1 Langsa, PDAM, Pendopo, Gedung Satpol PP dan WH, dan Kantor Pos Langsa. Selain itu, di Aceh Tamiang terdapat gedung pendopo Bupati dan bangunan industri perkebunan karet Belanda yang menjadi peninggalan sejarah yang penting.

Peninggalan sejarah tersebut memberikan gambaran tentang warisan budaya dan sejarah daerah tersebut.

**Kata Kunci:** bangunan Kolonial; identifikasi; pesisir Timur Aceh



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## Pendahuluan

Wilayah Pesisir Timur Aceh memiliki posisi strategis sebagai jalur perdagangan dan transportasi laut antara Aceh dengan negara-negara Asia dan Eropa. Kehadiran Kolonial Belanda di wilayah ini membawa pengaruh yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan perubahan budaya di daerah tersebut (Daulay & Abdullah, 2017). Sejarah Kolonial Belanda di Aceh mencakup periode yang signifikan dalam perkembangan Aceh dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas sejarah daerah tersebut. Pada abad ke-17 hingga ke-19, salah satu wilayah di Indonesia yang pernah diduduki Kolonial Belanda yaitu Aceh (Anwar, 2020). Selama masa pendudukan tersebut, Belanda membangun dan meninggalkan banyak jejak sejarah, termasuk bangunan-bangunan peninggalan yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Aceh.

Bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh menjadi bukti fisik dari interaksi antara Belanda dan masyarakat Aceh pada masa itu. Selain itu, bangunan-bangunan peninggalan ini juga memberikan bukti tentang perubahan budaya yang terjadi di Aceh selama periode Kolonial. Masyarakat Aceh pada masa itu terlibat dalam interaksi dengan bangsa asing, dan pengaruh Belanda tercermin dalam seni, budaya, dan adat istiadat yang berkembang di wilayah tersebut (Prasetyo & Kumalasari, 2021). Simbol perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masa Kolonial Belanda bisa dilihat dari peninggalan berupa bangunan-bangunan tersebut.

Bangunan-bangunan peninggalan tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Mereka mencerminkan periode penjajahan dan transformasi sosial yang terjadi di Aceh. Selain itu, bangunan-bangunan ini sering kali menjadi pusat kegiatan budaya dan pariwisata, menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara (S. Purnomo et al., 2022). Dengan mempelajari dan memahami bangunan-bangunan peninggalan tersebut, dapat diungkapkan cerita sejarah yang berharga dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masa lalu Aceh.

Seiring dengan pertumbuhan yang pesat di wilayah pesisir Timur Aceh (Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Tamiang) saat ini, kita menyaksikan kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Hal ini tercermin dalam kondisi bangunan yang masih mempertahankan ciri-ciri bangunan tua peninggalan Kolonial. Meskipun bangunan-bangunan ini mulai tergerus oleh perubahan zaman, penting untuk melindungi dan melestarikannya. Wilayah ini memiliki nilai sejarah yang signifikan, karena menyimpan peninggalan masa

Kolonial yang berharga. Melindungi dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah di wilayah pesisir Timur Aceh bukan hanya penting untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya lokal, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata yang berpotensi meningkatkan ekonomi lokal (Dafrina et al., 2022).

Pelestarian dan pengembangan bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh menghadapi tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan dengan serius. Tanpa upaya identifikasi dan perawatan yang memadai, bangunan-bangunan ini berisiko mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki akibat faktor alamiah seperti cuaca ekstrem, kekikisan, atau bahkan gempa bumi. Cuaca yang keras seperti hujan, angin, dan sinar matahari yang berkepanjangan dapat merusak material bangunan dan mengikis keindahan dan keaslian arsitektur Kolonial Belanda (Fauzia et al., 2021).

Selain itu, ancaman terhadap eksistensi bangunan-bangunan bersejarah ini juga datang dari adanya urbanisasi dan pembangunan modern yang terus berkembang (Hermawan, 2021). Pertumbuhan populasi dan kebutuhan akan ruang yang meningkat dapat memberikan tekanan untuk menggantikan bangunan-bangunan bersejarah ini dengan infrastruktur baru seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, atau hunian modern. Dalam beberapa kasus, bangunan bersejarah bahkan dapat dihancurkan untuk memberi jalan bagi pembangunan yang lebih baru dan fungsional (Yulia et al., 2022). Kekhawatiran lain adalah kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap nilai sejarah dan budaya bangunan-bangunan peninggalan Kolonial Belanda di kalangan masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya melestarikan warisan budaya dapat mengakibatkan penelantaran dan kurangnya dukungan untuk pelestarian bangunan-bangunan tersebut.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah yang konkret dan berkelanjutan. Hal pertama yang perlu dilakukan identifikasi yang komprehensif dan pemetaan yang akurat pada bangunan-bangunan yang menjadi peninggalan masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh. Menurut Richard and Roosandriantini (2023) definisi identifikasi ialah penetapan atau penentuan dalam identitas seseorang atau benda. Hal ini akan memungkinkan pengumpulan data yang lebih lengkap tentang sejarah, arsitektur, dan kondisi aktual bangunan-bangunan tersebut. Kendala lain dalam pelestarian dan pengembangan bangunan-bangunan peninggalan ini adalah kurangnya data dan informasi yang komprehensif. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang mendalam dan identifikasi yang akurat mengenai bangunan-bangunan ini, termasuk informasi tentang sejarah, arsitektur, dan kondisi aktualnya. Untuk menjaga keaslian dan kelestariannya, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengumpulkan data yang komprehensif dan melakukan penelitian yang lebih mendalam. Seperti identifikasi bangunan sejarah dalam penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2017) yang berjudul identifikasi bangunan cagar budaya di Kabupaten Wonosobo, yaitu khususnya identifikasi bangunan cagar budaya menjadi penting dalam konteks peningkatan Kota dengan peninggalan dari era Hindu-Buddha dan perkembangan Kota Wonosobo pada masa Kolonial Belanda.

Peningkatan pariwisata berbasis sejarah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini. Pariwisata berbasis sejarah memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi Masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh, dapat diciptakan destinasi wisata yang menarik, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, serta memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Selain itu, pengembangan pariwisata berbasis sejarah juga dapat mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap warisan budaya Aceh yang kaya.

Pelestarian mengenai peninggalan bangunan masa Kolonial sangat penting dilakukan. Hal tersebut seperti yang terdapat pada penelitian Simanjuntak (2023) "Pelestarian Cagar Budaya Arsitektur Konservasi Klenteng Darma Rakita Jamblang" dan penelitian Sagita et al., (2022) yang berjudul "Analisis Pelestarian Cagar Budaya Studi Kasus Cagar Budaya Taman Sari Gunongan" saling terkait dalam konteks pelestarian warisan budaya. Keterkaitan ini dapat ditemukan dalam perbandingan pendekatan penelitian keduanya. Sementara penelitian pertama berfokus pada pelestarian klenteng dengan penekanan pada aspek arsitektur dan konservasi, penelitian kedua mengeksplorasi strategi pelestarian melalui studi kasus Cagar Budaya Taman Sari Gunongan. Keduanya memiliki tujuan utama untuk menjaga keaslian dan integritas budaya, tetapi melalui pendekatan yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan identifikasi terhadap bangunan-bangunan peninggalan sejarah di pesisir Timur Aceh dengan tujuan utama untuk memahami dan menggambarkan kondisi terkini dari bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda tersebut. Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya yang berharga, memperkuat identitas lokal, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang sejarah daerah, serta menjalankan kajian sejarah dan sosial yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini juga memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan menciptakan destinasi wisata yang menarik dan memberikan kontribusi positif pada ekonomi lokal.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah atau historis. Menurut Wasino & Hartatik Sri Endah (2018), metode sejarah merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji kembali peristiwa di masa lalu dengan menggunakan seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis. Metode ini melibatkan pengumpulan sumber sejarah secara efektif, evaluasi yang kritis terhadap sumber-sumber tersebut, dan penyajian hasil sintesis dalam bentuk tulisan. Menurut Wasino & Hartatik Sri Endah (2018), langkah-langkah dalam penelitian sejarah mencakup pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).

Heuristik mengumpulkan sumber-sumber primer seperti dokumen arsip, surat-surat, foto-foto, dan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh. Kemudian melakukan survei lapangan untuk mencari dan mengidentifikasi bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di area pesisir Timur Aceh.

Verifikasi sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Sumber data ini mencakup catatan resmi, dokumen, surat-surat, dan arsip lainnya yang berkaitan dengan masa Kolonial Belanda di pesisir Timur Aceh. Pada tahapan verifikasi, peneliti melakukan kritik terhadap keabsahan dan keandalan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kemudian melakukan analisis terhadap potensi bias atau beberapa sudut pandang.

Intrepretasi dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan untuk merekonstruksi sejarah bangunan-bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda di pesisir Timur Aceh. Kemudian mencoba cari tahu tujuan awal pembangunan, pemiliknya, dan perubahan-perubahan yang terjadi sejak saat itu. Adapun teori yang digunakan pada tahapan interpretasi ialah teori poskolonial. Teori ini menyoroti dampak panjang kolonial pada budaya, masyarakat, dan ruang fisik setelah masa penjajahan berakhir.

Historiografi dengan menulis peristiwa yang terjadi pada masa lalu berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya yang kemudian telah dilakukan penafsiran mengenai identifikasi bangunan-bangunan peninggalan sejarah masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh. Pada tahapan penulisan peristiwa masa lalu ini diperlukan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang logis dan sistematis.

## **Hasil Penelitian**

### **Sejarah Masuknya Belanda ke Pesisir Timur Aceh**

Pada abad ke-18, Langsa didirikan oleh seorang pendatang dari Minangkabau bernama Datoe Dajang Menangkabauner. Datoe Dajang menjadi pemimpin pada masa itu. Namun, saat Belanda datang ke Langsa, pemimpin wilayah saat itu adalah Teuku Chik Bentara Blang, yang menolak kedatangan Belanda. Perselisihan antara uleebalang (pemimpin setempat) dengan pemerintah Belanda mencapai puncaknya pada 18 Mei 1877 (Rahman & Riyani, 2020).

Kota Langsa, pada periode 1877-1942, pernah dikunjungi oleh Belanda. Kehadiran Belanda di Langsa, yang saat itu masih bagian dari Aceh Timur, mengakibatkan pembangunan rel kereta api dan jalan raya guna mempermudah transportasi. Perluasan infrastruktur tersebut mencapai Sigli pada tahun 1898, melebihi wilayah Aceh Besar. Pada tahun 1903, jaringan kereta api sudah mencapai Langsa. Selanjutnya, pemerintah menghubungkan jaringan kereta api Aceh dengan kereta api Deli yang mencapai Pangkalan Brandan di Sumatera Utara (U. Ibrahim & Ibrahim, 2020).

Saat Belanda memasuki Langsa (dahulu Aceh Timur), mereka mulai membangun berbagai bangunan, termasuk pusat pemerintahan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Selain pusat pemerintahan, Belanda juga membangun perumahan dan toko di Langsa. Ketika berada di bawah penjajahan Belanda, Kota Langsa dijadikan sebagai tempat transit dan pos komando, sehingga banyak pejabat Belanda yang tinggal di sana. Dalam waktu singkat, Kota Langsa berkembang menjadi Kota yang besar, dengan pembangunan infrastruktur yang meliputi peninggalan Kolonialisme hingga saat ini (Muliana et al., 2022).

Pada masa pemerintahan Kolonial, Langsa dibangun menjadi ibukota *Afdeeling Oostkust van Atjeh* (*Afdeeling* Aceh Timur) dengan tujuan memenuhi kebutuhan industri perkebunan

yang membutuhkan pusat administrasi dan fasilitas yang memadai. Kebijakan modernisasi yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial pada saat itu juga berdampak pada perubahan lembaga mukim di daerah tersebut (Zakir, 2018). Sebelum kedatangan Belanda, Aceh Timur telah memiliki dua pelabuhan yang penting dalam aktivitas ekspor-impor, yaitu pelabuhan Idi dan pelabuhan Bayeun. Namun, setelah wilayah tersebut dikuasai oleh Belanda, pelabuhan-pelabuhan ini sempat ditutup untuk sementara waktu. Penutupan ini kemungkinan dilakukan sebagai upaya pemerintah Kolonial untuk mengendalikan aktivitas perdagangan di daerah tersebut. Meskipun demikian, pelabuhan-pelabuhan tersebut kemudian dibuka kembali dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan atau mungkin pertimbangan politik tertentu yang melibatkan kepentingan Kolonial pada saat itu (Usman et al., n.d.).

Pembangunan Langsa sebagai ibukota *Afdeeling* Aceh Timur dan keberadaan pelabuhan-pelabuhan penting sebelum dan sesudah kedatangan Belanda merupakan bagian dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di Aceh Timur pada masa Kolonial. Langsa sebagai ibukota dan kehadiran pelabuhan-pelabuhan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan aktivitas perdagangan di wilayah tersebut. Meskipun motivasi awal pembangunan dan pengelolaan pelabuhan mungkin berasal dari kepentingan Kolonial, namun dampaknya pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi setempat tidak dapat diabaikan (Setyawati, 2016).

Kolonialisasi Belanda meninggalkan banyak peninggalan sejarah, termasuk bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan Kolonial ini menunjukkan pengaruh arsitektur Eropa, dan secara intrinsik merupakan bagian dari perkembangan arsitektur Indonesia (H. Purnomo et al., 2017). Menurut Sumalyo Yulianto (1993) budaya Kolonial Belanda di Indonesia merupakan hasil percampuran antara budaya pendatang dan kebudayaan Indonesia. Gaya arsitektur bangunan tersebut juga disesuaikan dengan iklim di wilayah tertentu. Arsitektur Kolonial tersebar di seluruh Nusantara, dan peninggalan Kolonial Belanda termasuk bangunan dan benteng dengan arsitektur Kolonial juga dapat ditemukan di Langsa, yang dulunya masih bagian dari Kabupaten Aceh Timur saat masa penjajahan Belanda.

### **Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh**

Hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah lokasi objek bangunan peninggalan sejarah yang tersebar di beberapa titik di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Di Aceh Timur, terdapat Pendopo Bupati Aceh Timur dan Waduk Penampung Air sebagai peninggalan bersejarah. Kota Langsa juga memiliki beberapa bangunan peninggalan sejarah seperti Balee Juang, SD Negeri 1 Langsa, PDAM, Pendopo, Gedung Satpol PP dan WH, dan Kantor Pos Langsa. Selain itu, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat gedung pendopo Bupati dan bangunan industri perkebunan karet Belanda yang menjadi peninggalan sejarah yang penting.

#### **1. Pendopo Bupati Aceh Timur**

Pendopo ini dibangun dalam rentang waktu antara tahun 1903 hingga 1930. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari ayah responden, diketahui bahwa seorang pengawas bernama

Schulz pernah tinggal di bangunan pendopo tersebut pada tahun 1920. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa paviliun bupati dibangun antara tahun 1903 hingga 1920. Pada masa kolonial, gedung ini bernama *De Woning Van De Controleur*. Secara harfiah, dalam bahasa Belanda, kata "*Woning*" berarti "rumah", "*controleur*" berarti "inspektur", dan "*van*" berarti "di". Dengan demikian, terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah "Rumah Inspektur di Aceh Timur". Bangunan ini dulunya merupakan tempat tinggal inspektur Onder afdeling Idi pada masa penjajahan Belanda. Regulator Idi di bawah pengawasan Schulz berperan penting dalam pengembangan infrastruktur di Idi, termasuk kereta api, pusat pos, layanan telekomunikasi, dan bangunan-bangunan penting lainnya.

Setelah era otonomi, gedung ini terus digunakan dan difungsikan sebagai Kantor Asisten Wedana. Kantor Asisten Wedana memiliki kedudukan yang serupa dengan regulator, hanya saja istilah-istilah tersebut telah diubah ke dalam bahasa Indonesia, meskipun struktur otoritas publik masih belum mengalami perubahan sebagaimana yang dilakukan oleh Belanda. Kecamatan menjadi tanggung jawab Pembantu Wedana, sebuah jabatan pemerintahan di bawah tingkat wedana. Pada tahun 1959, terjadi penyesuaian dalam kerangka kekuasaan umum di mana Wedana Tangan Kanan digantikan oleh Pejabat Rekanan yang berada di bawah kekuasaan Pejabat. Hingga tahun 1999, gedung ini digunakan sebagai Kantor Pembantu Bupati. Pada tahun 1999, Aceh diberikan otonomi daerah, dan jabatan Pembantu Bupati dihapuskan. Sejak saat itu, kantor Camat Idi Rayeuk pindah ke gedung ini. Setelah wilayah Aceh Timur dimekarkan pada tahun 2002, Idi Rayeuk menjadi ibukota Kabupaten Aceh Timur. Pada tahun 2002, setelah pemekaran tersebut, gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Aceh Timur dan saat ini berfungsi sebagai pusat kegiatan regulasi dan sosial di Daerah Aceh Timur (Sari et al., 2019).



**Gambar 1.** Pendopo Bupati Aceh Timur

## **2. Waduk Penampung Air Belanda**

Waduk penampung air Peureulak di Aceh Timur memiliki sejarah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur air pada masa Kolonial Belanda. Waduk ini dibangun dengan tujuan untuk menyediakan pasokan air bersih dan pengairan untuk daerah sekitarnya. Pembangunan Waduk penampung air Peureulak diduga dilakukan pada masa awal abad ke-20, sekitar tahun 1920-an atau 1930-an. Bangunan ini menjadi pusat saluran air yang didistribusikan ke gedung-gedung, perkantoran, dan permukiman pada masa Kolonial Belanda. Fungsinya sebagai sumber

air bersih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perkembangan daerah tersebut.

Waduk peninggalan Kolonial yang terletak di Desa Alue Nibong, Kecamatan Peureulak, Aceh Timur, hingga saat ini masih tegak berdiri dengan kokoh. Waduk ini memberikan manfaat yang signifikan bagi petani sawah setempat, karena dibangun oleh Belanda pada masa itu sebagai sarana pengairan untuk sawah-sawah di sekitarnya. Selain memberikan manfaat kepada para petani, Pemerintah Desa setempat kini juga berinovasi dengan mengembangkan waduk ini sebagai tempat wisata baru di Aceh Timur (Saleh Muhammad, 2019).



**Gambar 2.** Waduk Penampung Air

### **3. Gedung Balee Juang Ex Bappeda Aceh Timur (Gedung Museum Langsa)**

Gedung Museum Langsa diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1910-an, dengan tujuan awal mendukung perkantoran industri perkebunan yang sedang berkembang di wilayah Aceh pada masa itu. Namun, pada tahun 1945, gedung ini memainkan peran penting dalam perang kemerdekaan sebagai tempat rapat bagi para pejuang yang melawan Jepang dan Kolonial Belanda. Dalam masa tersebut, gedung ini dikenal dengan nama Balee Juang. Setelah tahun 1945, gedung ini berfungsi sebagai kantor perusahaan pupuk Asri dan menjadi pusat kegiatan organisasi kemahasiswaan. Pada tahun 1980-an, gedung ini secara resmi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan berubah menjadi gedung perkantoran Bappeda Aceh Timur. Pada tahun 2014, gedung ini diserahkan kepada Pemerintah Kota Langsa dan diubah menjadi Gedung Museum Langsa oleh WaliKota Langsa. Pengakuan terhadap nilai historis dan budaya gedung ini tercermin dalam penetapan sebagai bangunan cagar budaya oleh WaliKota Langsa melalui Keputusan Nomor 188/430/2016, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2016.

Gedung Balee Juang adalah bangunan bersejarah yang dibangun oleh Kolonial Belanda dengan desain arsitektur khas Belanda. Museum Langsa terdiri dari dua lantai, dengan teras di lantai kedua yang menghadap ke jalan. Meskipun halamannya tidak terlalu luas, luas bangunan Museum Langsa mencapai sekitar 838 meter persegi, dengan luas lahan sekitar 905 meter persegi. Secara keseluruhan, gedung Museum Langsa memiliki warna putih dengan atap berwarna merah. Ventilasi dipasang di atap dan terdapat tulisan "Balee Juang" di bawah atap (Humaidy et al., 2022). Di Kota Langsa, gedung ini dikenal sebagai Bale Juang dan merupakan



salah satu situs bersejarah yang signifikan. Bale Juang memiliki nilai historis dalam perjuangan kemerdekaan dengan arsitektur bergaya Eropa. Pada masa transisi kemerdekaan, gedung Bale Juang bahkan digunakan sebagai tempat pencetakan uang, karena pada saat itu mata uang Belanda digantikan dengan rupiah. Museum Bale Juang yang ada saat ini menawarkan berbagai koleksi benda bersejarah yang menarik minat pengunjung, termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, baik dari dalam maupun luar wilayah. Banyak pengunjung yang datang ke Bale Juang untuk menemukan informasi dan data mengenai peninggalan sejarah yang terdapat di dalam museum, yang kini dikenal sebagai Museum Kota Langsa.



**Gambar 3.** Museum Kota Langsa

#### **4. SD Negeri 1 Langsa**

Gedung SD Negeri 1 Kota Langsa memiliki lokasi yang terletak di Jl. Cut Nyak Dhien, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Bangunan ini diperkirakan didirikan sekitar tahun 1910 dan pada awalnya digunakan sebagai fasilitas medis, yaitu Rumah Sakit Khusus Militer atau sebagai tempat tinggal bagi Militer Kolonial Belanda di Langsa. Arsitektur gedung ini menampilkan struktur yang panjang dengan satu lantai, dan terdapat kamar-kamar bangsal yang dapat menampung sekitar 20 tempat tidur. Sebagai peninggalan sejarah, Gedung SD Negeri 1 Kota Langsa memiliki nilai historis dan budaya yang sangat penting. Keberadaannya mencerminkan jejak masa lalu dan perkembangan sejarah Kota Langsa. Pada tanggal 7 Maret 2016, melalui Keputusan WaliKota Langsa Nomor 189/430/2016, gedung ini secara resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh WaliKota Langsa, Bapak Usman Abdullah. Pengakuan resmi ini mengamankan status gedung sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan sejarah dan budaya Kota Langsa.

Meskipun telah mengalami transformasi fungsi dari rumah sakit menjadi lembaga pendidikan, gedung ini tetap memancarkan nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya. Saat ini, Gedung SD Negeri 1 Kota Langsa masih berfungsi sebagai lembaga pendidikan, yaitu sekolah dasar yang melayani peserta didik di daerah tersebut. Keberlangsungan fungsi gedung ini sebagai sarana pendidikan membantu menjaga warisan sejarah dan memastikan bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan diteruskan kepada generasi yang akan datang.



**Gambar 4.** SD Negeri 1 Langsa

## **5. Tower Air PDAM Tirta Keumeuneng**

Tower PDAM Kota Langsa dibangun pada tahun 1928 bersamaan dengan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih di Keumueneng. Sejak saat itu, struktur tower ini berfungsi sebagai pusat distribusi air yang mengalir ke berbagai gedung, kantor, dan permukiman pada masa penjajahan Belanda. Desain arsitektur tower ini mengadopsi bentuk menara dengan pilar beton sebagai elemen penyangga yang mampu menopang beban tangki penyimpanan air. Diperkirakan kapasitas penampungan air yang dapat diakomodasi oleh tower ini sekitar 50.000 liter. Sebagai bangunan peninggalan sejarah, tower PDAM Kota Langsa memiliki nilai historis dan budaya yang penting. Kehadirannya menjadi bukti fisik dari perkembangan infrastruktur air bersih pada masa penjajahan Belanda di Kota ini. Pada tanggal 7 Maret 2016, WaliKota Langsa, Bapak Usman Abdullah, menetapkan tower PDAM sebagai bangunan cagar budaya melalui Keputusan WaliKota Langsa Nomor 190/430/2016. Pengakuan resmi ini mengukuhkan status tower PDAM sebagai bagian yang tak terpisahkan dari warisan sejarah dan budaya Kota Langsa.

Hingga saat ini, tower PDAM Kota Langsa tetap berdiri tegak sebagai saksi bisu dari masa Kolonial Belanda. Keberadaannya menjadi simbol yang mengingatkan kita akan perjalanan panjang dalam penyediaan air bersih di Kota ini. Tower ini juga mencerminkan ketekunan dan ketahanan struktur bangunan yang dirancang pada masa itu. Meskipun telah berusia puluhan tahun, kekokohan tower PDAM ini masih terjaga, memberikan gambaran tentang kualitas konstruksi dan keunggulan teknik pada masa itu. Pemeliharaan dan pelestarian tower PDAM Kota Langsa menjadi tanggung jawab untuk menjaga warisan sejarah dan budaya Kota ini. Sebagai simbol masa lalu, tower ini memberikan wawasan yang berharga tentang kemajuan teknologi dan infrastruktur di masa lampau. Pemahaman dan apresiasi terhadap tower PDAM ini juga berperan penting dalam memperkuat identitas Kota Langsa dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya bagi masa depan.



**Gambar 5.** Tower Air PDAM Tirta Keumeuneng

## **6. Pendopo Langsa**

Pada kondisi keamanan yang semakin kondusif di Aceh pada umumnya, Gedung Pendopo Langsa memegang peran ganda sebagai rumah dinas dan kantor bagi pejabat Belanda yang bertugas mengatur pemerintahan di onderafdeling Langsa. Onderafdeling ini mengelola wilayah yang meliputi Manyak Payed, Sungai Raya, Peureulak, Lokop, dan Serbajadi di Aceh Timur. Terletak di pusat Kota, Gedung Pendopo ini berdekatan dengan bangunan Kolonial lainnya, menciptakan kompleks arsitektur yang memperkaya panorama sejarah Kota. Gedung Pendopo Langsa memiliki nilai sejarah yang kuat dan secara resmi diakui sebagai cagar budaya. Keputusan WaliKota Langsa Nomor 186/430/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2016 oleh WaliKota Langsa, Bapak Usman Abdullah, memberikan pengakuan tersebut. Keberadaan gedung ini menjadi bukti fisik yang berdiri tegak sebagai saksi bisu dari masa Kolonial Belanda yang telah berlalu. Dalam kekokohnya, Gedung Pendopo Langsa memancarkan nilai-nilai historis yang terkandung di dalamnya, menjadikannya simbol penting dari warisan budaya Kota Langsa.

Gedung Pendopo Langsa tidak hanya mewakili era Kolonial Belanda, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan minat bagi para pengunjung dan masyarakat lokal. Keberadaannya memberikan kesempatan bagi mereka untuk memahami dan menghargai perjalanan sejarah Kota tersebut. Selain itu, gedung ini juga menjadi tempat penting untuk acara-acara resmi, upacara adat, pertemuan masyarakat, dan kegiatan budaya lainnya. Sebagai bagian dari kompleks arsitektur Kolonial di Langsa, Pendopo menjadi elemen yang memperkaya panorama sejarah Kota dan menghadirkan nilai estetika yang tak ternilai. Melalui peran gandanya sebagai rumah dinas dan kantor pemerintahan Kolonial Belanda serta statusnya sebagai cagar budaya, Gedung Pendopo Langsa menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Bangunan ini tidak hanya menceritakan kisah sejarah, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial dan ekspresi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat. Sebagai warisan budaya yang berharga, Gedung Pendopo Langsa menunjukkan pentingnya melestarikan dan memahami warisan sejarah untuk menghormati masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik.



**Gambar 6.** Pendopo Langsa

## **7. Gedung Satpol PP dan WH Kota Langsa**

Gedung Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa diduga didirikan pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1910-an, bersamaan dengan pembangunan Gedung Museum Langsa. Menurut keterangan masyarakat setempat, gedung ini awalnya berfungsi sebagai kantor administrasi Kereta Api Langsa. Kehadirannya sebagai bagian dari warisan sejarah memberikan nilai historis dan budaya yang signifikan bagi Kota Langsa. Pada tanggal 7 Maret 2016, WaliKota Langsa, Bapak Usman Abdullah, menetapkan Gedung Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa sebagai bangunan cagar budaya melalui Keputusan WaliKota Langsa Nomor 187/430/2016. Pengakuan resmi ini menegaskan pentingnya gedung ini sebagai bagian dari identitas sejarah dan budaya Kota Langsa. Dalam penunjukan sebagai cagar budaya, gedung ini menjadi objek perlindungan dan pelestarian, serta menjadi saksi bisu dari masa lalu yang telah berlalu.

Gedung Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa tidak hanya memiliki nilai historis yang signifikan, tetapi juga menjadi bagian yang penting dalam konteks arsitektur Kota. Gaya arsitektur yang mungkin mencerminkan pengaruh Kolonial Belanda atau pengaruh lokal pada masa tersebut dapat menjadi objek studi bagi sejarawan dan arsitek. Selain itu, kehadiran gedung ini juga memberikan daya tarik visual dan estetika yang khas, menambah keindahan dan keunikan Kota Langsa. Sebagai bangunan cagar budaya, Gedung Kantor Satpol PP & WH Kota Langsa menjadi saksi sejarah yang mengingatkan kita akan perjalanan panjang Kota tersebut. Melalui pengakuan resmi dan perhatian yang diberikan oleh pemerintah setempat, gedung ini diharapkan dapat dilestarikan dan dirawat dengan baik, sehingga tetap dapat disaksikan oleh generasi mendatang. Pemahaman dan penghargaan terhadap warisan sejarah seperti gedung ini memberikan pelajaran berharga tentang identitas dan perkembangan Kota, serta mendorong keberlanjutan budaya dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya bagi masa depan.



**Gambar 7.** Gedung Satpol PP dan WH Kota Langsa

#### 8. Gedung Kantor Pos Langsa

Pada masa Kolonial Belanda, pembangunan infrastruktur pos merupakan hal penting dalam upaya memperluas jaringan komunikasi dan pengiriman surat-menyurat. Bangunan Kantor Pos Kota Langsa diduga dibangun pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1910-an atau 1920-an. Gedung Kantor Pos tersebut merupakan salah satu penanda keberadaan sistem pos di Kota Langsa. Sebagai kantor pos, gedung ini berfungsi sebagai pusat distribusi surat, paket, dan layanan pos lainnya (Siregar Khairul Ikhsan Raja, 2017). Masyarakat dapat mengirim dan menerima surat, mengirim uang, serta mengakses layanan pos lainnya di gedung ini. Selama masa penjajahan Belanda, Kantor Pos Kota Langsa berperan dalam menghubungkan Kota Langsa dengan daerah-daerah lain di Aceh maupun dengan daerah luar. Layanan pos sangat penting dalam menjaga komunikasi dan hubungan antara penduduk setempat dengan keluarga atau kenalan di tempat lain. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, peran Kantor Pos Kota Langsa mengalami perubahan. Dengan munculnya komunikasi elektronik dan internet, penggunaan layanan pos tradisional telah berkurang. Meskipun begitu, bangunan Kantor Pos Kota Langsa tetap menjadi simbol sejarah dan bagian dari warisan budaya daerah tersebut.



**Gambar 8.** Gedung Kantor Pos Langsa

#### 9. Pendopo Bupati Aceh Tamiang

Salah satu bangunan bersejarah yang patut disebutkan adalah Pendopo Bupati, yang terletak di Kecamatan Kota Kualasimpang. Bangunan ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Eks Kantor Wedana masa Kolonial Belanda, dan saat ini telah diubah menjadi Pendopo Bupati berkat inisiatif dari H. Hamdan Sati, ST selaku Bupati Aceh Tamiang. Menurut literatur

yang ada, pembangunan Eks Kantor Wedana masa Kolonial Belanda ini hampir bersamaan dengan pembangunan Istana Raja Karang Tamiang di Karang Baru, dan menjadi gedung megah pertama yang dibangun untuk keperluan administrasi Kolonial Belanda di Kabupaten Aceh Tamiang pada masa itu. Kantor Wedana di Aceh Tamiang memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan Kolonial Belanda di wilayah tersebut. Fungsi utamanya meliputi pengumpulan pajak, pengaturan pertanian, pengawasan keamanan, dan penegakan hukum. Para pejabat Wedana bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas tersebut serta memimpin administrasi di wilayah Aceh Tamiang.

Pada tanggal 26 Januari 2015, peristiwa bersejarah terjadi ketika bangunan eks Kantor Wedana masa Kolonial Belanda resmi diubah menjadi Pendopo Bupati Aceh Tamiang. Acara tersebut ditandai dengan pelaksanaan upacara tepung tawar yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tamiang, H. Hamdan Sati, ST, dan Isteri. Hadir pula unsur Muspida dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta tokoh masyarakat, termasuk almarhum Drs. Abdul Latief, yang merupakan mantan Bupati Aceh Tamiang periode 2002-2012 (Bakri, 2015).



**Gambar 9.** Pendopo Bupati Aceh Tamiang

## **10. Bangunan Industri Perkebunan Karet Belanda**

Pada masa pendudukan Belanda di Aceh Tamiang, industri karet di Kabupaten Aceh Tamiang, terutama di Desa Alue Jambu, menjadi salah satu usaha sit gum (getah bermutu tinggi) yang terkemuka. Meskipun masih menggunakan alat produksi manual, kualitas lateks yang dihasilkan tetap terjaga. Pada tanggal 1 Oktober 1926, dua pemimpin Mavr asal Belanda, yaitu Addie Verschure dan L. W. Van Roggen, mendirikan perusahaan karet ini. Bisnis ini mulai berkembang pesat seiring waktu karena lokasinya yang strategis, dekat dengan pusat Kota, sehingga memudahkan pengiriman barang ke daerah lain. Sejak berdirinya pada tahun 1926, organisasi ini telah mengembangkan sejumlah bangunan, termasuk danau trim elastis, rumah otoritas Belanda, tempat tidur buruh, tempat tinggal staf, dan penjara. Bagi buruh perakitan yang melakukan kesalahan dalam pekerjaan, mereka akan langsung ditegur dan dihukum cambuk di penjara. Meskipun awalnya dikendalikan oleh Belanda, organisasi ini juga terlibat dalam produksi plastik. Namun, pada tahun 1976, Belanda akhirnya melepaskan kendali penuh atas industri ini (Hamdani et al., 2014).

Setelah itu, Teuku Jalil mengambil alih perkebunan karet tersebut dan mengubahnya menjadi perkebunan kelapa sawit yang masih beroperasi hingga sekarang. Meskipun usaha ini

terus berjalan, sayangnya, bangunan-bangunan bersejarah era Kolonial Belanda di perkebunan tersebut sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak lagi digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah dan warisan Kolonial Belanda di daerah ini belum mendapat perhatian yang cukup dalam hal pelestarian. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat guna menjaga dan melestarikan bangunan-bangunan bersejarah ini sebagai bagian integral dari warisan budaya Aceh Tamiang, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menjaga sejarah lokal untuk generasi saat ini dan masa depan.



**Gambar 10.** Bangunan Industri Perkebunan Karet Belanda

### **Pemetaan Persebaran Cagar Budaya Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh**

Cagar budaya memiliki dua aspek utama, yaitu sifat material dan sifat non-material. Kedua aspek ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena mereka menentukan nilai budaya suatu bangsa pada saat itu. Warisan budaya, yang meliputi benda-benda bersejarah, bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya, memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah serta sebagai sumber pengetahuan dan pengembangan kebudayaan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga, melindungi, merawat, dan menyelamatkan cagar budaya (Ibrahim, 2018).

Menurut Feilden dalam Tamimi et al., (2020), banyak bangunan Kolonial termasuk dalam daftar bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya memiliki karakteristik yang menakjubkan dan menjadi objek studi dalam bidang kebudayaan, sosial, dan manusia yang membanggunya. Karena nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh bangunan-bangunan Kolonial ini, penting untuk melestarikannya. Oleh karena itu, bangunan-bangunan peninggalan Kolonial di Aceh sangat penting untuk dilestarikan.

Beberapa Kota di luar Kutaraja, yang sekarang dikenal sebagai Banda Aceh, memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi Kolonial melalui sektor industri utama di wilayah tersebut. Setiap Kota memiliki peran khusus dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kolonial di daerah tersebut. Sebagai contoh, Kutaraja berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan, menjadi titik sentral yang vital dalam aktivitas ekonomi dan administrasi. Peurelak menjadi pusat industri pertambangan minyak bumi, dengan sumber daya alamnya

yang kaya dan potensial dalam industri ini. Langsa, di sisi lain, memiliki fokus pada perkebunan karet, menjadi daerah yang strategis dalam produksi dan ekspor komoditas ini. Sementara itu, Kuala Simpang memiliki ketergantungan pada pertambangan minyak bumi, serta perkebunan karet dan kelapa sawit.

Menurut Ismail dalam penelitian Muhajir et al., (2017), Langsa (*onderafdeeling* Langsa) dan Kualasimpang (*onderafdeeling* Tamiang) menjadi dua Kota baru yang muncul setelah industri hadir di Aceh Timur pada awal abad ke-20. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya Aceh Timur sebagai wilayah yang memiliki peran signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di Aceh. Dengan adanya perkembangan industri di Kota-Kota ini, wilayah Aceh Timur menjadi pusat aktivitas ekonomi yang penting, memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi Kolonial di Aceh secara keseluruhan. Peran ekonomi dan industri dalam Kota-Kota di luar Kutaraja menunjukkan kekayaan sumber daya alam Aceh Timur dan pentingnya wilayah ini dalam konteks pembangunan Kolonial (Muhajir, 2018). Selain itu, hal ini juga mencerminkan bagaimana Aceh Timur memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan menjadi bagian integral dari sejarah ekonomi Aceh secara keseluruhan.

Pesisir Timur Aceh memiliki peran penting dalam mempertahankan identitas budaya, meningkatkan kesadaran sejarah, dan menjadi daya tarik pariwisata yang unik. Pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya di daerah ini menjadi penting untuk membanggakan warisan budaya yang kaya dan berkontribusi positif bagi pembangunan budaya dan pariwisata (Meiranda et al., 2020). Dalam waktu yang relatif singkat, Langsa berkembang menjadi sebuah Kota besar yang vital selama masa penjajahan Belanda. Infrastruktur yang dibangun di Kota tersebut mencakup berbagai fasilitas pendukung, menjadikannya Kota Kolonial dengan bangunan-bangunan bergaya Belanda.

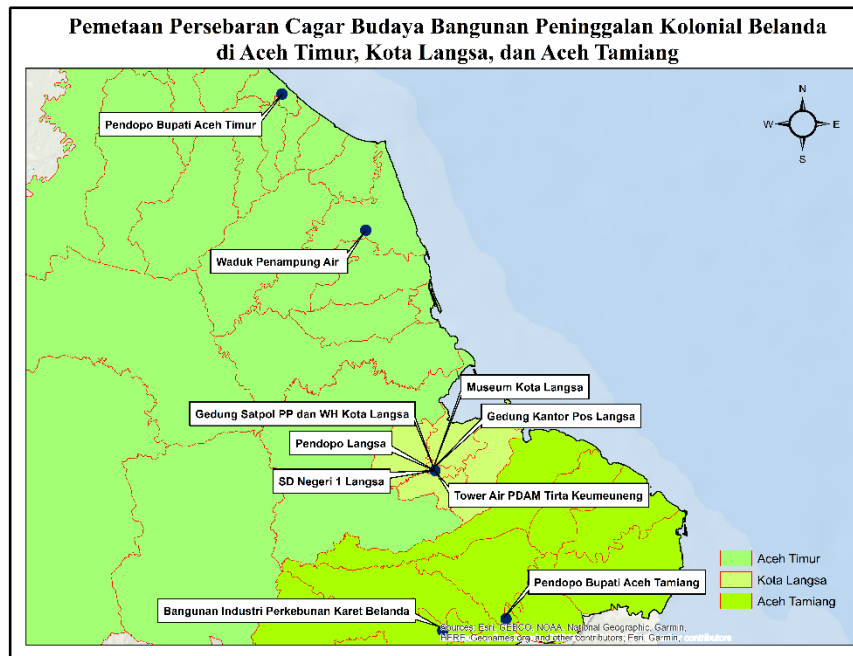
Langsa telah menjadi pusat perkembangan industri perkotaan yang meliputi sektor transportasi, komunikasi, dan layanan umum yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pemerintah Kolonial berperan aktif dalam mendirikan industri-industri ini guna mendukung sektor industri di wilayah pedesaan. Di sisi lain, sektor industri di pedesaan Langsa terdiri dari perkebunan karet dan pertambangan minyak bumi yang dikuasai oleh pengusaha kapitalis swasta. Langsa juga terlibat dalam industri hulu yang menghasilkan barang-barang setengah jadi seperti lateks dan minyak mentah, yang kemudian dikirim ke daerah industri hilir baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Pertumbuhan ruang perkotaan di Langsa sangat terkait dengan kebutuhan dan konsumsi penduduk yang terpenuhi melalui fasilitas pendukung yang tersedia. Pada tahun 1905, pemerintah Kolonial memulai perencanaan pembangunan Kota secara komprehensif di Langsa Tunong dengan bantuan Korps Zeni. Langsa Tunong kemudian ditetapkan sebagai ibukota *Afdeeling* Aceh Timur dan *Onderafdeeling* Langsa pada tahun 1908. Dalam waktu singkat, Langsa berkembang menjadi Kota Kolonial yang ramai dan modern di kawasan pantai Timur Aceh. Perkembangan industri dan infrastruktur yang pesat di Langsa memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi wilayah tersebut. Kota ini menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan, dengan fasilitas transportasi yang memadai dan koneksi



Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh

komunikasi yang baik. Industri-industri yang berkembang di Langsa juga menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan standar hidup mereka. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan, Langsa menjadi contoh nyata bagaimana peran industri perkotaan dapat membentuk dan mengubah wajah suatu Kota serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi wilayah setempat (Muhajir et al., 2017).



**Gambar 11.** Peta Persebaran Cagar Budaya Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh

Pada gambar 11, pemetaan cagar budaya di pesisir Timur Aceh melibatkan beberapa titik penting di berbagai daerah, termasuk Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Di Aceh Timur, salah satu situs yang termasuk adalah Pendopo Bupati Aceh Timur, yang memiliki nilai historis dan budaya yang signifikan. Selain itu, Waduk Penampung Air juga masuk dalam daftar cagar budaya di wilayah ini, menunjukkan pentingnya dalam konteks pengelolaan sumber daya air di daerah tersebut. Kota Langsa juga memiliki sejumlah bangunan yang telah diakui sebagai cagar budaya. Gedung Balee Juang, sebagai salah satu contohnya, merupakan simbol perjuangan dan semangat juang masyarakat Langsa dalam menghadapi peristiwa sejarah penting. SD Negeri 1 Langsa juga menjadi bagian dari pemetaan cagar budaya, menunjukkan pentingnya pendidikan dan lembaga pendidikan dalam pembentukan identitas dan sejarah Kota ini. Selain itu, Gedung Pendopo, Gedung Satpol PP dan WH, PDAM, serta Kantor Pos Langsa juga merupakan bagian dari pemetaan ini, menggambarkan keberagaman fungsi bangunan yang memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi.

Aceh Tamiang juga memiliki kontribusi dalam pemetaan cagar budaya. Gedung Pendopo Bupati menjadi salah satu bangunan yang diakui sebagai warisan budaya, menggambarkan peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam sejarah dan perkembangan wilayah ini.

Selain itu, ada juga bangunan industri perkebunan karet Belanda yang mencerminkan sejarah industri dan pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Pemetaan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang warisan budaya dan sejarah di pesisir Timur Aceh. Identifikasi dan perlindungan terhadap lokasi-lokasi cagar budaya ini menjadi penting dalam menjaga kekayaan budaya dan sejarah daerah tersebut, serta memperkuat identitas lokal dan meningkatkan kesadaran akan warisan budaya yang dimiliki. Dengan pemetaan yang komprehensif, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam memelihara dan menghargai cagar budaya ini untuk generasi yang akan datang.

### **Kesimpulan**

Sejumlah lokasi objek bangunan peninggalan sejarah masa Kolonial Belanda yang tersebar di beberapa titik di Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Di Aceh Timur, terdapat Pendopo Bupati Aceh Timur dan Waduk Penampung Air sebagai peninggalan bersejarah. Kota Langsa juga memiliki beberapa bangunan peninggalan sejarah seperti Balee Juang, SD Negeri 1 Langsa, PDAM, Pendopo, Gedung Satpol PP dan WH, dan Kantor Pos Langsa. Selain itu, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat gedung pendopo Bupati dan bangunan industri perkebunan karet Belanda yang menjadi peninggalan sejarah yang penting. Peninggalan sejarah tersebut memberikan gambaran tentang warisan budaya dan sejarah daerah tersebut. Penulis berharap agar pemerintah dan masyarakat pesisir Timur Aceh bersama-sama melestarikan bangunan-bangunan peninggalan sejarah masa Kolonial Belanda. Implikasi pada penelitian ini ialah pemeliharaan dan pelestarian, edukasi agar kesadaran masyarakat yang lebih baik.

### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra yang telah mendanai penelitian ini. Selain itu, tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para dosen dan mahasiswa yang telah memberikan bantuan yang luar biasa dalam pelaksanaan penelitian ini.

### **Daftar Rujukan**

- Anwar, A. (2020). Strategi Kolonial Belanda Dalam Menaklukkan Kerajaan Aceh Darussalam. *Jurnal Adabiya*, 19(1), 13–28. <http://dx.doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7482>.
- Bakri. (2015, January 27). *Bupati Aceh Tamiang Resmikan Pendapa*. Serambinews.Com. <https://aceh.tribunnews.com/2015/01/27/bupati-aceh-tamiang-resmikan-pendapa>.
- Dafrina, A., Muhammad, M., Andriani, D., & Fitri, R. (2022). Identifikasi Bangunan Kolonial pada Hunian di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebagai Aset Heritage. *Jurnal Serambi Engineering*, 7(2), 3163-3172. <https://doi.org/10.32672/jse.v7i2.4209>.
- Daulay, M. G., & Abdullah, T. (2017). Pemukiman Militer Peninggalan Belanda Di Banda Aceh (Kajian Komparasi Perkembangan Pemukiman Militer di Neusu Jaya dan Kuta Alam, 1900-2015). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(2), 119-130. <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/3774>.

- Fauzia, V. A., Kurniawan, E. B., & Wijaya, I. N. S. (2021). Tingkat Perubahan Bangunan Hindia Belanda di Kawasan Cagar Budaya Kotabaru, Kota Yogyakarta. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 13(2), 87–98. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2021.013.02.5>.
- Hamdani, R., Firmansyah, A.-F., Aulia, F., Syahputra, R., Zahwa, U., & Agustina, H. (2014). Industri Getah di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 1926-1976. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, 1(1), 72–77. <http://jurnal.unsam.ac.id/index.php/jsnbl/article/view/517>.
- Hamzah, F., Hermawan, H., Srinatami, D., (2021). Analisis Strategi Pengembangan Situs Cagar Budaya Gunung Padang Sebagai Destinasi Wisata dan Peninggalan Sejarah Kebudayaan. *Media Wisata*, 19(1), 57-67. <https://doi.org/10.36276/mws.v19i1.66>.
- Humaidy, E. A., Dewi, C., & Muftiadi, M. (2022). Strategi Revitalisasi Gedung Juang Dengan Konsep Adaptive Reuse Menjadi Museum. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Dan Perencanaan*, 6(1), 41–47. <http://jim.usk.ac.id/ArsitekturPWK/article/view/16441>.
- Ibrahim, H. (2018). Cagar Budaya di Aceh dan Tanggung Jawab Pemeliharannya. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 1(2). <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/view/20827>.
- Ibrahim, U., & Ibrahim, H. (2020). Awal perintisan kereta api di Aceh: Analisis Historis dan Politik Tahun 1876-1896. *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan*, 1(1), 95–102. <https://semnasfkipunsam.id/index.php/semnas2019/article/view/20>.
- Kurniawan, E. W. (2017). Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo. In *Prosiding Seminar Nasional Arsitektur Populis* (p. B1-B33). <http://repository.unika.ac.id/15668/>.
- Meiranda, A., Rianto, T., & Yasmin, N. (2020). Pengaruh industri pariwisata terhadap peninggalan bangunan kolonial di Kota Langsa. In *Seminar Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan* (Vol. 1, No. 1, pp. 546-548). <https://semnasfkipunsam.id/index.php/semnas2019/article/view/158>.
- Muhajir, A. (2018). Langkah Politik Belanda di Aceh Timur: Memahami Sisi Lain Sejarah Perang Aceh, 1873-1912. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 160–171. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.515>.
- Muhajir, A., Yuliati, D., & Rochwulaningsih, Y. (2017). Industrialisasi dan Eksistensi Kota Langsa pada Era Kolonial, 1907-1942. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1), 63–76. <https://doi.org/10.15294/paramita.v27i1.7320>.
- Muliana, M., Safyan, A., & Saputra, E. (2022). Identifikasi Fasad Museum Kota Langsa Sebagai Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda. *Rumoh: Journal of Architecture*, 12(2), 53–60. <https://doi.org/10.37598/rumoh.v12i2.209>.
- Prasetyo, O., & Kumalasari, D. (2021). Nilai-Nilai Tradisi Peusijuek Sebagai Pembelajaran Sejarah Berbasis Kearifan Lokal: Indonesia. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(3), 359–365. <https://doi.org/10.31091/mudra.v36i3.1387>.

Madhan Anis, Ramazan Ramazan, Okhaifi Prasetyo, Reni Nuryanti, Intan Safitri, Wiwin Mauladi, Maya Puspita, Mutiara Rahayu

Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh

- Purnomo, H., Waani, J. O., & Wuisang, C. E. V. (2017). Gaya & Karakter Visual Arsitektur Kolonial Belanda Di Kawasan Benteng Oranje Ternate. *Media Matrasain*, 14(1), 23–33. <https://doi.org/10.35792/matrasain.v14i1.15443>.
- Purnomo, S., Ratnawati, D., Arifin, N., & Setuju, S. (2022, December). Pengembangan daya tarik obyek wisata Gunungjambu berbasis karifan lokal Gunungkidul. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 408–414). [https://seminar.ustjogja.ac.id/index.php/semnas\\_LP2M\\_UST/article/view/642](https://seminar.ustjogja.ac.id/index.php/semnas_LP2M_UST/article/view/642).
- Rahman, A., & Riyani, M. (2020). Cagar Budaya dan Memori Kolektif: Membangun Kesadaran Sejarah Masyarakat Lokal Berbasis Peninggalan Cagar Budaya di Aceh Bagian Timur. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 12–25. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15346>.
- Richard, B., & Roosandriantini, J. (2023). Identification Of Colonial Architectural Style In Majapahit Hotel Building And Surabaya Youth Center Identifikasi Langgam Arsitektur Kolonial Pada Bangunan Hotel Majapahit dan Balai Pemuda Surabaya. *Arsitektur Universitas Pandanaran Jurnal (ARSIP)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.54325/arsip.v3i1.38>.
- Sagita, E. S., Nurlaili, N., & Nurkamari, N. (2022). Analisis Pelestarian Cagar Budaya Studi Kasus Cagar Budaya Taman Sari Gunungan. *Jurnal Sains Riset*, 12(2), 351–354. <https://doi.org/10.47647/jsr.v12i2.697>.
- Salah Muhammad. (2019, September 15). *Waduk Belanda di Peureulak, Potensi Wisata Masa Depan*. MODUSACEH.CO. <https://modusaceh.co/news/waduk-belanda-di-peureulak-potensi-wisata-masa-depan/index.html>.
- Sari, I. Y., Karsono, B., & Nurhaiza, N. (2019). Pelestarian Pendopo Aceh Timur Ditinjau Dari Sejarah Bangunan. *Jaur (Journal Of Architecture And Urbanism Research)*, 3(1), 69–76. <https://doi.org/10.31289/jaur.v3i1.2938>.
- Setyawati, D. (2023). Perkembangan Perkebunan di Aceh Abad Ke XIII–XIX. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 5(1), 25–30. <https://doi.org/10.31540/sindang.v5i1.1838>.
- Simanjuntak, R. S. M. (2023). Pelestarian Cagar Budaya Arsitektur Konservasi Klenteng Darma Rakita Jamblang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 5898–5911. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5311>.
- Siregar, R. K. I. (2017). Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Kota Langsa. *Skripsi. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3880/>.
- Sumalyo Yulianto. (1993). *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Gadjah Mada University Pers.

Madhan Anis, Ramazan Ramazan, Okhaifi Prasetyo, Reni Nuryanti, Intan Safitri, Wiwin Mauladi, Maya Puspita, Mutiara Rahayu

Identifikasi Bangunan-Bangunan Peninggalan Sejarah Masa Kolonial Belanda di Pesisir Timur Aceh

Tamimi, N., Fatimah, I. S., & Hadi, A. A. (2020). Tipologi Arsitektur Kolonial di Indonesia. *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*, 10(8), 45-52. <http://dx.doi.org/10.22441/vitruvian.2020.v10i1.006>.

Usman, U., Akob, B., & Sahudra, T. M. (n.d.). Aceh East Coast Community Economic Development (Historical Study And Existence Of Kuala Langsa Port And Its Contribution To The Government Of 1900-2018). *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 111–120. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v15i1.42676>.

Wasino, & Hartatik Sri Endah. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari riset hingga penulisan* (Cetakan 1). Magnum Pustaka Utama.

Yulia, R., Erawati, M., Asnan, G., & Nopriyasman, N. (2022). Revitalisasi Kawasan Kota Tua Padang sebagai Salah Satu Alternatif Wisata Sejarah di Kota Padang. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, 6(2), 17–22. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2017.v6i2>.

Zakir, M. (2018). Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era Kolonial, 1907-1942. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 2(2), 269–277. <http://dx.doi.org/10.30829/j.v2i2.3039>.